

## Penilaian Keadilan Hukuman Kejahatan Seksual: Tinjauan dari Latar Belakang Pendidikan dan Gender

Fathul Lubabin Nuqul \*

### Abstract

*Public's opinion about justice of punishment for rapist, influenced by many variables, for example gender and educational background. It is causing there is difference between expert of law and layperson, but in other side the role of sexism also determines judgment to justice of punishment for sexual offenders. The Purpose of the research is to exam individual judgment to justice of punishment for sexual offenders by considering gender, and educational background. The research involves 197 university students. It composes Islamic law student and psychology student. The result of the research indicates that no difference between Islam law majors students with psychology student in judgment to justice of punishment for sexual offenders. In other side the research also founds a difference between men and women in judgment to justice of punishment for sexual offenders. Women more feel injustice in judgment to punishment for sexual offenders.*

Kata kunci: *judgment, fairness, punishment, rape.*

### A. Pendahuluan

Tindak pidana seksual merupakan tindak pidana yang unik, khususnya karena secara hukum kejahatan seksual khususnya di KUHP selalu pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan<sup>1</sup>. Dari sisi frekwensi dianggap cukup sering, Tercatat bahwa dalam triwulan ketiga tahun 1994 terdapat 363 kasus pemerkosaan, yang bila diambil rata-ratanya maka dalam setahun ada sekitar 1500 kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Kasus yang tercatat tersebut belum dapat diambil sebagai patokan jumlah kasus yang sesungguhnya, mengingat banyak kejadian pemerkosaan yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan jauh lebih tinggi.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan, sulit sekali mengajak korban maupun keluarga korban untuk melaporkan kasus-kasusnya ke kepolisian, rasa malu dan trauma serta ancaman dari pelaku merupakan alasan bagi korban untuk menyimpan lara dalam diri sendiri. Kondisi seperti ini yang membuat fakta tentang kasus-kasus pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya mengikuti fenomena gunung Es.

Kejahatan seksual dianggap sebagai tindak kejahatan yang berbahaya, paling tidak itu terjadi dalam stereotipe

masyarakat. Dari sisi viktimologi, korban kejahatan seksual akan menanggung beban mental yang luar biasa. Dari sisi pelaku memunculkan anggapan bahwa pelaku merupakan individu yang tidak normal, mengalami gangguan jiwa, tidak dapat disembuhkan dan tidak bermoral.<sup>3</sup> Pendapat yang lain menyatakan bahwa kejahatan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai modus mulai dengan membujuk sampai dengan pemaksaan<sup>4</sup>.

Sebagai sebuah kejahatan, maka perlu adanya penegakan hukum yang adil. Permasalahannya, rasa keadilan sering kali dimaknai berbeda untuk tiap orang. Misalnya korban ingin pelaku dihukum seberat beratnya dan bagi pelaku dia ingin hanya mendapat hukuman ringan-ringannya. Hal ini akan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam jika terdapat sebuah putusan hakim dianggap tidak adil. Permasalahannya *sexism* dan pengetahuan tentang tindak pidana pemerkosaan khususnya dan kejahatan seksual pada umumnya telah menimbulkan bias dalam penilaian terhadap penjahat dan korban kejahatan. Hal ini tentunya sedikit banyak menghambat penegakan hukum.



### 1. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual yang diatur dalam sistem hukum Indonesia, dalam hal ini KUHP, bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, Zina yang diatur dalam pasal 284 KUHP; kedua, pemerkosaan, yang diatur dalam pasal 285 KUHP; pencabulan, yang diatur dalam pasal 286 KUHP dan perdagangan perempuan.<sup>5</sup> Kejahatan seksual dianggap oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berbahaya.<sup>6</sup> Beberapa alasan masyarakat menempatkan kejahatan seksual sebagai kejahatan yang berbahaya antara lain karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cenderung diulang dan perilaku pelakunya tak bisa dirubah.<sup>7</sup> Selain itu dalam kejahatan seksual juga sering kali diiringi dengan kekejaman yang lain seperti penganiayaan fisik dan pembunuhan.<sup>8</sup>

Griffia dan West menemukan perbedaan antara penilaian masyarakat umum dengan informasi faktual tentang pelaku kejahatan seksual. Misalnya masyarakat menginginkan pengawasan yang super ketat dan hukum yang super tegas untuk melakukan pencegahan munculnya penjahat seksual. Meskipun demikian, dilaporkan bahwa ketika dibandingkan antara kejahatan seksual dengan kejahatan lain, seperti *drug*, pencurian,<sup>9</sup> dan perampokan.<sup>10</sup> Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengulangan kejahatan seksual kembali tergolong rendah, dan perilaku pelaku kejahatan seksual juga bisa diubah dengan *treatment* tertentu.<sup>11</sup> Bahkan jika kejahatan seksual dianggap lebih tidak bermoral dibanding dengan kejahatan yang lain hal ini sedikit terbantahkan. Ashkar dan Kenny melakukan penelitian tentang perbedaan *moral reasoning* pada remaja melakukan kejahatan seksual dan kejahatan non seksual, menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berada pada taraf pre-conventional.<sup>12</sup> Kontroversi ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat awam sering kali bertentangan dengan informasi faktual.

Kontroversi pemahaman masyarakat ini terkait juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pemahaman kriminalitas secara menyeluruh. Tak banyak informasi valid yang meneliti tentang pelaku kejahatan seksual. Fedoroff dan Moran melaporkan temuannya, bahwa individu yang diuntungkan secara sosial-ekonomi dan yang terlibat dalam kasus kejahatan seksual mampu "lepas" dari investigasi atau penelitian.<sup>13</sup> Maka dari itu, banyak yang mengatakan bahwa penelitian tentang pelaku kejahatan seksual mengalami *sampling bias*. Jika peneliti mengalami kesulitan untuk menentukan dan melakukan studi tentang kejahatan seksual secara obyektif maka tak heran jika masyarakat awam mempunyai masalah yang sama untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat tentang pelaku kejahatan seksual dan masyarakat awam cenderung untuk bersikap secara kontroversi pada pelaku kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

Kelemahan yang lain, penelitian sering menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual dipandang negatif oleh ahli dan masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual sering kali di pandang secara stereotipe, tanpa referensi yang luas. Sikap yang negatif terlihat sebagai kemarahan individu yang mengalami kejahatan seksual.<sup>16</sup>

### 2. Pendidikan, Jenis Kelamin dan Penilaian Keadilan Hukuman untuk Pelaku Kejahatan Seksual

Kematangan pemahaman hukum mempengaruhi penilaian pada tindakan kejahatan dan pembedaannya. Hasil penelitian Stalans & Lurigio menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pakar profesional dan orang awam dalam mempersepsi tindak kejahatan dan hukuman yang pantas untuk pelaku tindak kejahatan tersebut. Dalam analisisnya, keduanya mengatakan bahwa orang awam mempersepsi tindak kejahatan dan hukuman yang pantas, hanya berdasarkan pengalaman dan informasi sepiantas orang



awam tersebut tentang kejahatan. Sedangkan profesional atau *expert* dalam bidang hukum yang sering berinteraksi dengan pelaku kejahatan, memandang tindak kejahatan secara lebih sistematis<sup>17</sup>. Sistematisasi pandangan individu terhadap kejahatan di pengaruhi oleh sejauh mana individu tersebut mempunyai wawasan terhadap kriminalitas dan hukum secara benar untuk itu aspek pendidikan juga dianggap penting dalam mempegaruhi penilaian keadilan sebuah hukuman yang diberikan untuk pelaku kejahatan.

Beberapa penelitian lain telah meneliti hubungan antara pendidikan dan pemidanaan dan sikap terhadap kejahatan. Hasil temuannya cukup konsisten dan menunjukkan hubungan negatif antara dua variabel tersebut.<sup>18</sup> Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang maka makin rendah kecenderungan pemidanaan pada penjahat pelaku kriminal. Di sisi lain sejumlah penelitian gagal menemukan hubungan yang signifikan antara keduanya,<sup>19</sup> sedangkan penelitian yang lain juga menemukan yang dilakukan oleh ditemukan bahwa pendidikan berhubungan secara tidak langsung dengan pemidanaan.<sup>20</sup>

Langworthy dan Whitehead menemukan bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan pemidanaan melalui dua variabel sikap yaitu; liberalism (dukungan untuk memberikan program sosial) dan ketakutan pada tidak kejahatan (konsen pada *victimization*). Penelitian mereka menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan responden cenderung kurang mendukung pemerintah untuk mengadakan program sosial dan mereka cenderung mendukung kebijakan untuk memberikan hukuman.<sup>21</sup> Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan yang lebih tinggi, lebih cenderung tidak takut dengan kejahatan cenderung dan kurang mendukung kebijakan untuk menghukum.

Hubungan tidak langsung antara pendidikan dengan kecenderungan

menghukum, juga dikemukakan oleh penelitian Sims tentang hubungan antara *causal belief* tindak kejahatan (*causal attribution*) dan pemidanaan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan secara tidak langsung dengan pemidanaan melalui lima faktor atribusi. Penemuannya menunjukkan bahwa makin tinggi pendidikan responden makin mendukung pada proses sosial, subkultur dan perspektif labeling dan cenderung kurang mendukung perspektif struktural dan perspektif klasik terhadap perilaku penjahat. Tingkat dukungan pada masing-masing perspektif bertindak sebagai variabel intervening antara pendidikan dengan seluruh level dari pemidanaan.<sup>22</sup> Hasil temuan dua penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dengan *punitiveness*, cukup kompleks dibandingkan dengan temuan hubungan langsung pada penelitian sebelumnya.

Mackey dan Courtright menemukan bahwa ada hubungan negatif antara level pendidikan dan *punitiveness*. Pada mahasiswa jurusan *criminal justice* dan *non criminal justice*, untuk mahasiswa senior mempunyai tingkat motivasi untuk menghukum lebih rendah (secara signifikan) dibanding dengan mahasiswa juniornya.<sup>23</sup> Farnworth et al. juga menemukan bahwa pelajar yang senior cenderung kurang mempunyai motivasi menghukum dibanding dengan mahasiswa baru. Farnworth et al. menambahkan bahwa penemuannya memberikan dukungan untuk pengaruh liberalisasi pendidikan di kampus.<sup>24</sup>

Sejumlah penelitian lain telah melihat hubungan antara jenis kelamin dengan pemidanaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang kompleks. Meskipun banyak penelitian menghasilkan temuan yang inkonsisten dan agak sulit untuk menginterpretasi setiap penelitian tentang *punitiveness* yang melibatkan jenis kelamin dalam studinya. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa laki-laki cenderung mempunyai sikap yang menghukum dibanding dengan



perempuan,<sup>25</sup> sedangkan studi yang lain menemukan perempuan lebih mempunyai sikap menghukum dibanding dengan laki-laki.<sup>26</sup> Beberapa penelitian lain yang melibatkan jenis kelaminnya dalam model mereka tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keduanya dalam pengukuran tentang pembedaan atau sikap terhadap hukuman.<sup>27</sup>

Laki-laki ditemukan lebih mendukung *capital punishment* dari pada perempuan dan sebaliknya perempuan cenderung mendukung rehabilitasi dibandingkan dengan laki-laki.<sup>28</sup> Laki-laki juga lebih mendukung hukuman mati dibanding perempuan,<sup>29</sup> tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Applegate et al, tidak ditemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sikap untuk menghukum lebih berat di pengadilan,<sup>30</sup> dan pada filosofi tentang pembedaan.<sup>31</sup>

Applegate, et al, melakukan penelitian tentang pandangan publik terhadap kebijakan hukuman penjara untuk melihat apakah ada perbedaan pandangan dari sisi gender. Ditemukan bahwa perempuan lebih mendukung rehabilitasi dan laki-laki lebih mendukung *capital punishment*. Meskipun ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam sikap menghukum tetapi ditemukan bahwa kontribusi (varian) jenis kelamin terhadap sikap menghukum sangat kecil hanya 0,5 % - 3,8%, sehingga Applegate, et al mengatakan meskipun ada apa perbedaan signifikan secara statistik tetapi sikap perempuan dan laki-laki dalam menghukum sebenarnya tidak berbeda.<sup>32</sup>

Hurwitz dan Smithey juga mengukur perbedaan sikap terhadap kriminalitas dan hukuman pada laki-laki dan perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum responden perempuan lebih mendukung usaha preventif untuk menanggulangi kriminalitas, seperti pembatasan senjata api, merehabilitasi pengguna narkoba dan menganggarkan uang untuk program latihan kerja. Artinya perempuan lebih ringan dalam menuntut hukuman dibanding dengan laki-laki dalam menyikapi tindak

pidana dan cenderung lebih menilai adil terhadap hukuman yang diberikan untuk pelaku kejahatan. Hurwitz dan Smithey (1998) juga menemukan bahwa jenis kelamin menjadi prediktor yang signifikan pada sikap responden terhadap keputusan menghukum dalam kriminalitas seperti penambahan masa hukuman penjara, dan *capital punishment*, tetapi ada kesulitan untuk mengenali pola yang konsisten dari sikap laki-laki dan perempuan.

Hurwitz dan Smithey mengatakan bahwa "pola sikap menghukum antara jenis kelamin sangat tergantung dari konteks",<sup>33</sup> atau dengan kata lain tergantung dari bentuk kasus yang disodorkan. Sebagai contoh bahwa laki-laki cenderung lebih mendukung hukuman mati dari perempuan tetapi laki-laki cenderung memberi hukuman yang lebih rendah pada pelaku penjahat obat-obatan terlarang.<sup>34</sup>

Dalam kasus pidana pemerkosaan siapa yang lebih bersalah korban (perempuan) ataukah pelaku (laki-laki), seberapa berat pelaku harus dihukum, dan aturan apa yang digunakan untuk menghukum pelanggar yang digunakan. Pada individu yang mempercayai bahwa pemerkosaan adalah kesalahan pelaku (beranggapan pemerkosaan disebabkan oleh keadaan yang dialami oleh laki-laki seperti *Male dominance, male sexuality, male* dan *male pathology*, cenderung untuk menghukum pemerkosa lebih berat,<sup>35</sup> perempuan cenderung anti pada *myth of rape* dibanding dengan laki-laki, dan anti pada *myth of rape* cenderung akan menghukum pelaku pemerkosaan lebih berat.<sup>36</sup> Sehingga perempuan cenderung lebih menuntut hukuman berat dalam kasus-kasus kejahatan seksual dan cenderung merasa kurang adil jika pelaku diganjar dengan hukuman yang "ringan".

Hubungan antara jenis kelamin dengan sikap menghukum sangat kompleks dan kedua jenis kelamin mempunyai hubungan yang langsung dan tidak langsung.<sup>37</sup> Langworthy dan Whitehead dalam penelitiannya menemukan bahwa



laki-laki secara umum lebih mempunyai sikap menghukum daripada perempuan, tetapi hubungan yang tak langsung (*indirect relationship*) pun ada baik melalui variabel liberalism (dukungan untuk mengadakan program sosial) maupun variabel *fear of crime*. Temuan penelitian Langworthy dan Whitehead mengatakan bahwa perempuan kurang mempunyai sikap menghukum dan sebaliknya, perempuan mendukung pemerintah untuk membuat program sosial tetapi jika perempuan yang takut pada kejahatan perempuan tersebut cenderung lebih termotivasi menghukum.<sup>38</sup>

Hubungan antara jenis kelamin dengan sikap menghukum pada pelajar dan mahasiswa masih menyisakan ambiguitas. Mackey and Courtright tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pelajar laki-laki dan pelajar perempuan dalam sikap menghukum, meskipun dalam hipotesanya mengarahkan bahwa pelajar laki-laki mempunyai sikap menghukum lebih tinggi daripada perempuan. Dalam penelitian tentang persepsi pelajar tentang *criminal justice*, Tsoudis menemukan bahwa pelajar perempuan lebih mendukung memberikan hukuman yang lebih berat seperti hukuman mati, memukul dengan tongkat dan menyiksa pelaku kejahatan.<sup>39</sup> Meskipun begitu, Farnworth, et al, mengatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi pada mahasiswa jurusan hukum pidana (hasilnya menunjukkan laki-laki lebih tinggi) dan mahasiswa bukan jurusan hukum pidana (hasilnya menunjukkan perempuan lebih tinggi). Semua hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa begitu kompleks hubungan antara jenis kelamin dengan sikap atau penilaian pada keadilan pidana.

Untuk itu menarik kiranya untuk meneliti apakah jenis kelamin dan latar belakang pendidikan, baik yang berlatar belakang hukum maupun bukan berlatar belakang hukum, mempunyai pengaruh pada penilaian terhadap keadilan pidana untuk pelaku kejahatan seksual?

## B. METODE

### 1. Sampel Penelitian.

Secara umum sampel dalam penelitian kali ini adalah mahasiswa yang berjumlah 197 orang. Untuk melihat efek dari pendidikan terhadap penilaian keadilan pidana, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu mahasiswa fakultas Psikologi yang berjumlah 77 orang dan fakultas Hukum Islam yang berjumlah 120 orang. Sebagai catatan bahwa mahasiswa yang dilibatkan adalah mereka yang minimal telah berada pada semester 6. Hal ini bahwa pada semester 6 telah mendapatkan mata kuliah ilmu hukum dan hukum pidana. Dari sisi jenis kelamin, ada sebanyak 92 perempuan dan 105 laki-laki.

### 2. Pengukuran

Beberapa penelitian terdahulu mengukur tentang penilaian atau sikap individu pada kejahatan atau sikap menghukum dengan menggunakan kuisioner, misalnya penelitian tentang support pada hukuman mati atau riset tentang sikap publik terhadap narapidana<sup>40</sup> dan penelitian yang lain menggunakan *vignettes* atau skenario tertentu yang memudahkan responden untuk memahami tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan kondisi dari korban, dari skenario tersebut responden bisa menilai atau menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku.<sup>41</sup> Pada penelitian ini menggunakan skenario yang disadur dari berita kasus pemerkosaan dari Sriwijaya Post. Adapun skenarionya sebagai berikut:

Kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung korban. Pelakunya PN 45 tahun, warga kota XXX, Ia melakukan pemerkosaan pada putri keempatnya, berinisial SH 11 tahun. Perbuatan ini terungkap setelah YI ibunda korban, mencurigai perilaku putrinya. SH yang periang mendadak jadi pendiam. Ia mengurung diri di dalam kamar, dan enggan bermain dengan teman sebayanya. Kepada



sang ibu, SH mengaku diperkosa ayahnya. Setelah diproses di kepolisian, kemudian kasus PN dilimpahkan ke pengadilan. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri XXX.

Dari skenario tersebut di tanyakan tentang penilaian hukuman yang diberikan oleh hakim selama 7 tahun tersebut dengan menanyakan dengan pertanyaan antara lain dengan pertanyaan "Dari cerita di atas, menurut pendapat anda apakah putusan hakim merupakan putusan yang adil?" Kemudian responden menjawab beberapa aitem dengan model *semantic differential* "sangat adil - sangat tidak adil". Skoring dengan interval 1 – 7. Secara keseluruhan ada 7 aitem yang harus di respon oleh responden terkait dengan skenario tersebut. Untuk mengukur besaran rekomendasi hukuman yang diharapkan digunakan *open ended* (pertanyaan terbuka) dengan pertanyaan sebagai berikut "menurut anda hukuman apa atau seberapa lama yang cocok untuk pelaku?"

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa penilaian hukuman pelaku kejahatan seksual rerata pada mahasiswa laki-laki adalah 72,77, sedangkan pada mahasiswa perempuan adalah 77,01 dengan nilai t sebesar 2.2271 dan nilai p sebesar 0.024 ( $p < 0,05$  menunjukkan ada perbedaan yang signifikan). Dengan demikian penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan lebih besar dibandingkan pada mahasiswa laki-laki secara signifikan.

Hasil ini merupakan hasil yang telah diduga sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks kejahatan dan bentuk kejahatan mempunyai efek pada penilaian individu. Pada kasus kejahatan seksual dan pemerkosaan, perempuan cenderung lebih sensitif, karena perempuan berada pada pihak korban. Empati pada korban yang berjenis kelamin sama cenderung menuntut hukuman yang seberat

beratnya untuk pelaku. Pada kasus kejahatan seksual berpotensi lebih memunculkan *fear of crime* pada perempuan dari pada laki-laki. Tentunya, *fear of crime* ini juga akan memberikan dampak pada sikap menghukum, meskipun sebenarnya dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa perempuan kurang mempunyai sikap menghukum dan lebih usaha rehabilitasi untuk penjahat tetapi jika perempuan yang takut pada kejahatan perempuan tersebut cenderung lebih termotivasi menghukum.<sup>42</sup>

Penilaian keseriusan pada kejahatan seksual, khususnya pemerkosaan, sangat berpotensi dipengaruhi *sexism*. Hal ini bisa terlihat dari pernyataan aktivis perempuan Nursyabani Kantjasungkana yang menyatakan bahwa "masalah pemerkosaan yang dialami pemerkosaan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki".<sup>43</sup> Pernyataan ini memberikan kesan bahwa dikotomi dan prasangka laki-laki-perempuan telah termanifestasi pada kasus-kasus pemerkosaan.

Uji perbedaan penilaian keadilan hukuman pelaku kejahatan seksual antara mahasiswa jurusan Hukum Islam (rerata 75,23) dengan mahasiswa jurusan Psikologi (rerata 74,00) ditemukan nilai t sebesar 0,639 dengan nilai p sebesar 0,524 ( $p > 0,05$  menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan). Artinya bahwa tidak ada perbedaan penilaian keadilan hukuman pelaku kejahatan seksual antara responden yang berlatar belakang hukum dan non hukum dalam hal ini psikologi.

Beberapa hal yang berpotensi mempengaruhi hasil ini adalah pertama interaksi responden, baik berlatar belakang hukum maupun yang tidak, dengan pelaku atau kejadian nyata tentang kejahatan. Bagi mahasiswa jurusan hukum Islam meskipun telah mendapatkan mata kuliah ilmu hukum dan hukum pidana, tetapi waktu mereka lebih banyak berada di kelas. Kondisi seperti ini membuat sikap mereka sama dengan mahasiswa yang tidak belajar hukum.



Analisa ini didasarkan pada penelitian Hogue, yang meneliti tentang sikap pada penjahat seksual dengan melibatkan responden yang terdiri dari berbagai macam profesi, seperti polisi, sipir penjara, penjaga tempat rehabilitasi dan psikolog. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa petugas atau profesional yang memberikan perawatan pada pelaku kejahatan seksual, seperti psikolog dan petugas rehabilitasi lebih memberikan sikap positif dibandingkan dengan petugas yang tidak memberikan pelayanan langsung pada pelaku, seperti polisi dan sipir penjara, yang memberikan sikap lebih negatif pada pelaku kejahatan seksual. Dalam catatan penelitiannya Hogue berpendapat bahwa perbedaan ini dipengaruhi oleh kebiasaan berinteraksi dengan pelaku kejahatan seksual<sup>44</sup>.

Kemungkinan kedua yang mempengaruhi penilaian responden adalah skenario yang diberikan. pada skenario tersebut responden cenderung menganggap pelaku sangat bersalah karena dilihat dari sisi usia pelaku dan ketidak berdayaan korban, jika melihat pada usia yang masih muda,<sup>45</sup> sehingga responden cenderung merespon secara emosional dibanding secara kognitif. Hal ini yang dimungkinkan menyebabkan tidak adanya perbedaan penilaian hukuman untuk pelaku.

Kemungkinan yang ketiga adalah level pemahaman hukum. Pengambilan sampel pada penelitian ini hanya melihat pada pengakuan responden tentang jurusan (hukum dan non hukum) yang mereka ambil. Hal ini mempunyai kelemahan ketika dalam penelitian ini ingin melihat efek pemahaman hukum terhadap penilaian keadilan pembedaan. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa individu yang *expert* dalam bidang hukum cenderung memandang tindak kejahatan secara lebih sistematis dibanding dengan orang awam,<sup>46</sup> tetapi hal ini tidak terjadi pada level mahasiswa. Sehingga untuk meyakinkan bahwa ada perbedaan kemampuan dalam memahami hukum maka perlu diadakan tes

pemahaman tentang hukum pidana. Skor dari tes inilah yang digunakan untuk memilah *expert* atau tidak orang dalam bidang hukum bukan dari latar belakang pendidikannya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rekomendasi hukuman yang diberikan oleh responden jauh melampaui hukuman yang termaktup di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pemberian hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Variasi hukuman yang dianggap layak oleh responden berkisar antara untuk pelaku kejahatan seksual berkisar hukuman bebas sampai – hukuman mati. Tetapi secara prosentase sebanyak 34 % dari 197 responden merekomendasikan hukuman mati untuk pelaku, dan 29,4 % merekomendasikan hukuman seumur hidup dan selebihnya menganjurkan hukuman penjara. Tentu rekomendasi jauh lebih besar daripada hukuman yang termaktub dalam KUHP untuk pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menganggap bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan yang berat dan harus di hukum dengan hukuman yang tegas.<sup>47</sup> Opini masyarakat terhadap hukuman yang tepat sangat dipengaruhi oleh penilaian masyarakat terhadap kerawanan dari kejahatan semakin berbahaya sebuah kejahatan maka akan memotivasi seseorang untuk menerapkan hukuman berat.<sup>48</sup> Begitu juga dengan kejahatan pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, yang sering laki dianggap sebagai kejahatan yang dimotivasi nafsu binatang dan gangguan mental.<sup>49</sup> Maka dari itu perlu kiranya uji kelayakan undang-undang yang mampu memberikan rasa keadilan untuk masyarakat terkait dengan kejahatan seksual. Meskipun demikian telah ada kemajuan dalam kemajuan hukum misalnya telah ada tentang undang-undang perlindungan anak dan undang-undang penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menjerat para pelaku

kejahatan dengan pasal berlapis dan hukuman yang lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

#### D. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin mempunyai efek yang lebih besar daripada latar belakang pendidikan dalam mempengaruhi penilaian terhadap keadilan hukuman untuk pelaku kejahatan pemerkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian keadilan ini lebih dipengaruhi oleh faktor non kognitif (jenis kelamin) dibanding faktor kognitif (latar belakang pendidikan). Hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa responden memberikan rekomendasi hukuman yang jauh lebih berat dari pada hukuman untuk pemerkosaan yang ada di KUHP mempunyai implikasi, bahwa perlu adanya peninjauan undang-undang hukum pidana (KUHP) untuk kejahatan pemerkosaan. Hal ini terkait dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Applegate, B. K., Cullen, F. T., & Fisher, B. S., "Public Views Toward Crime and Correctional Policies: Is there a Gender Gap", *Journal of Criminal Justice*, 2002.
- Applegate, B. K., Cullen, F. T., Fisher, B. S., & Vander Ven, T., "Forgiveness and Fundamentalism: Reconsidering the Relationship Between Correctional Attitudes Religion", *Criminology*, 2000.
- Ashkar, P. J., & Kenny, D. T., "Moral Reasoning of Adolescent Male Offenders: Comparison of Sexual and Non Sexual Offenders", *Criminal Justice and Behavior*, 2007.
- Church, W. T., Wakeman, E. E., Miller, S. L., Clements, C. B., & Sun, F., "The Community Attitudes Toward Sex Offenders Scale: The Development of a Psychometric Assessment Instrument", *Research on Social Work Practice*, 2008.
- Cowan, G., "Belief About The Causes of Four Types of Rape", *Sex Role*, 2000.
- Cullen, F. T., Clark, G. A., Cullen, J. B., & Mathers, R. A., "Attribution, Salience, and Attitudes Toward Criminal Sanctioning", *Criminal Justice and Behavior*, 1985.
- Farnworth, M., Longmire, D. R., & West, V. M., "College Students' Views On Criminal Justice", *Journal of Criminal Justice Education*, 1998.
- Feather, N. T., "Reaction to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism, Values, Perceived Responsibility, Perceived Seriousness and Deservingness", *Journal of Personality and Social Psychology*, 1998.
- Fedoroff, J. P., & Moran, B., "Myths and Misconceptions about Sex Offenders", *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 1997.
- Gray, J. M., "Rape Myth Belief and Prejudice: Effect on Guilt in Case of Date Rape", *Legal and Criminological Psychology*, 2006.
- Griffin, M. P., & West, D. A., "The Lowest of the Low? Addressing the Disparity between Community View, Public Policy, and Treatment Effectiveness for Sex Offenders", *Law & Psychology Review*, 2006.
- Hogue, T. E., "Attitudes Towards Prisoners and Sexual Offenders", *Issues in Criminal & Legal Psychology*, 1993.
- Hurwitz, J., & Smithey, S., "Gender Differences on Crime and Punishment", *Political Research Quarterly*, 1998.
- Hutapea, R., *AIDS, PMS dan Pemerkosaan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1995.



- Karen, T., "Sex Offenders", *Criminology & Public Policy*, 2003.
- Langworthy, R. H., & Whitehead, J. T., "Liberalism and Fear as Explanations of Punitiveness", *Criminology*, 1986.
- Mackey, D. A., & Courtright, K. E., "Assessing Punitiveness among College Students: A Comparison of Criminal Justice Majors with Other Majors", *The Justice Professional*, 2000.
- Melvin, K. B., Gramling, L. K., & Gardner, W. M., "A Scale to Measure Attitudes toward Prisoners", *Criminal Justice & Behavior*, 1985.
- Rogers, D. L., *Struktural Analysis of Treatment and Punishment Attitudes toward Offenders*, Ohio: The Ohio State University, 2004.
- Sample, L. L., & Bray, T. M., "Are Sex Offenders Dangerous?" *Criminology and Public Policy*, 2003.
- Sims, B., "The Impact of Causal Attribution on Correctional Ideology: A National Study", *Criminal Justice Review*, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1996.
- Stalans, L. J., & Lurigio, A. J., "Lay and Professionals' Belief About Crime and Criminal Sentencing: A Need for Theory, Perhaps Schema Theory", *Criminal Justice Behavior*, 1990.
- Tsoudis, O., "Does Majoring in Criminal Justice Affect Perceptions of Criminal Justice?" *Journal of Criminal Justice Education*, 2000.
- Wahid, A., & Irfan, M., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- undang menganggap bahwa perempuan tidak mungkin memaksa laki-laki untuk melakukan hubungan seksual. Lihat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea 1996, p. 210
- <sup>2</sup> Hutapea, R. *AIDS, PMS dan Pemerkosaan*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1995), p. 111.
- <sup>3</sup> Karen, T., "Sex Offenders", *Criminology & Public Policy*, 2003, p. 57.
- <sup>4</sup> Wahid, A., & Irfan, M. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama 2001).
- <sup>5</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1996), pp. 209-211.
- <sup>6</sup> Sample, L. L., & Bray, T. M., "Are Sex Offenders Dangerous?" *Criminology and Public Policy*, 2003, p. 60.
- <sup>7</sup> Griffin, M. P., & West, D. A., "The Lowest of the Low? Addressing the Disparity between Community View, Public Policy, and Treatment Effectiveness for Sex Offenders", *Law & Psychology Review*, 2006, p. 143.
- <sup>8</sup> Karen, "Sex Offenders", p. 58.
- <sup>9</sup> Griffin & West, "The Lowest", p. 142.
- <sup>10</sup> Sample, & Bray, "Are Sex", pp. 59-82.
- <sup>11</sup> Griffin, & West, "The Lowest", p. 147.
- <sup>12</sup> Ashkar, P. J., & Kenny, D. T., "Moral Reasoning of Adolescent Male Offenders: Comparison of Sexual and Non Sexual Offenders", *Criminal Justice and Behavior*, 2007, p. 115.
- <sup>13</sup> Fedoroff, J. P., & Moran, B. "Myths and Misconceptions about Sex Offenders", *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 2007, pp. 263-276.
- <sup>14</sup> Church, W. T., Wakeman, E. E., Miller, S. L., Clements, C. B., & Sun, F., "The Community Attitudes Toward Sex Offenders Scale: The Development of a Psychometric Assessment Instrument", *Research on Social Work Practice*, 2008, pp. 251-259.
- <sup>15</sup> Griffin, & West, "The Lowest", pp. 143-169.
- <sup>16</sup> Church, et al., "The Community", pp. 251-259.
- <sup>17</sup> Stalans, L. J., & Lurigio, A. J., "Lay and Professionals' Belief About Crime and Criminal Sentencing: A Need for Theory, Perhaps Schema Theory", *Criminal Justice Behavior*, 1990, pp. 333-349.
- <sup>18</sup> Applegate, B. K., Cullen, F. T., Fisher, B. S., & Vander Ven, T., "Forgiveness and Fundamentalism: Reconsidering the Relationship between Correctional Attitudes Religion", *Criminology*, 2000, pp. 38, 719-753.
- <sup>19</sup> Cullen, F. T., Clark, G. A., Cullen, J. B., & Mathers, R. A., "Attribution, Salience, and Attitudes toward Criminal Sanctioning", *Criminal Justice and Behavior*, 1985, pp. 12, 305-331.
- <sup>20</sup> Langworthy, R. H., & Whitehead, J. T., "Liberalism and Fear as Explanations of Punitiveness", *Criminology*, 1986, pp. 575-591.

\* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, email lubab\_psi@yahoo.com.

<sup>1</sup> Soesilo, R. Dalam penjelasan pasal 285 KUHP, mengatakan bahwa pembuat undang-



- <sup>21</sup> *Ibid.*
- <sup>22</sup> Sims, B., "The Impact of Causal Attribution on Correctional Ideology: A National Study", *Criminal Justice Review*, 2003, pp. 28, 1-25.
- <sup>23</sup> Mackey, D. A., & Courtwright, K. E., "Assessing Punitiveness among College Students: A Comparison of Criminal Justice Majors with other Majors", *The Justice Professional*, 2000, pp. 12, 423-441.
- <sup>24</sup> M. Farnworth, et al., D. R. Longmire, & V. M. West, "College Students' Views On Criminal Justice", *Journal of Criminal Justice Education*, 1998, pp. 39-57.
- <sup>25</sup> Applegate, et al., "Forgiveness", pp. 89-100.
- <sup>26</sup> Tsoudis, O., "Does Majoring in Criminal Justice Affect Perceptions of Criminal Justice?" *Journal of Criminal Justice Education*, 2000, pp. 225-236.
- <sup>27</sup> Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Applegate, et al., (2000); Cullen, et al., (1996), Mackey & Courtwright, (2000), Sims, (2003) menunjukkan hasil perbedaan yang inkonsisten antara laki-laki dan perempuan dalam motivasi menghukum.
- <sup>28</sup> Cullen, et al., "Attribution", pp. 305-331.
- <sup>29</sup> Sims, "The Impact", pp. 1-25.
- <sup>30</sup> Applegate, et al., "Forgiveness", pp. 719-753.
- <sup>31</sup> Cullen, "Attribution", pp. 305-331.
- <sup>32</sup> Applegate, et al., "Forgiveness", pp. 719-753.
- <sup>33</sup> Hurwitz, J., & Smithey, S., "Gender Differences on Crime and Punishment", *Political Research Quarterly*, 1998, pp. 51, 89-115.
- <sup>34</sup> *Ibid.*
- <sup>35</sup> G. Cowan, "Belief About The Causes of Four Types of Rape", *Sex Role*, 2000, pp. 807-823.
- <sup>36</sup> Gray, J. M., "Rape Myth Belief and Prejudice: Effect on Guilt in Case of Date Rape", *Legal and Criminological Psychology*, 2006, pp. 1175-80.
- <sup>37</sup> Langworthy, & Whitehead, "Liberalism", pp. 575-591.
- <sup>38</sup> *Ibid.*
- <sup>39</sup> Tsoudis, "Does Majoring", pp. 225-236.
- <sup>40</sup> Melvin, K. B., Gramling, L. K., & Gardner, W. M., "A Scale to Measure Attitudes toward Prisoners", *Criminal Justice & Behavior*, 1985, pp. 241-253.
- <sup>41</sup> Feather, N. T., "Reaction to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism, Values, Perceived Responsibility, Perceived Seriousness and Deservingness", *Journal of Personality and Social Psychology*, 1998, pp. 571-587.
- <sup>42</sup> Langworthy, & Whitehead, "Liberalism", pp. 575-591.
- <sup>43</sup> Wahid, & Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), p. 65.
- <sup>44</sup> Hogue, T. E., "Attitudes towards Prisoners and Sexual Offenders", *Issues in Criminal & Legal Psychology*, 1993, pp. 23-32.
- <sup>45</sup> Rogers, D. L., *Struktural Analysis of Treatment and Punishment Attitudes toward Offenders*, (Ohio: The Ohio State University, 2004).
- <sup>46</sup> Stalans, & Lurigio, "Lay and Professionals", pp. 333-349.
- <sup>47</sup> Sample, & Bray, "Are Sex", pp. 59-82.
- <sup>48</sup> Rogers, *Struktural Analysis of Treatment and Punishment Attitudes toward Offenders*, (Ohio: The Ohio State University, 2004), p. 16.
- <sup>49</sup> Wahid, & Irfan, *Perlindungan*, pp. 48-49.



## Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *SOSIO-RELIGIA* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian keagamaan dan sosial.
2. Bersifat ilmiah.
3. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya dengan disertai abstrak berbahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci, referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
5. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kuarto.
6. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai CD (master) atau file naskah dikirimkan ke email [linksas\\_jogja@yahoo.com](mailto:linksas_jogja@yahoo.com) atau [jurnalsosioreligia@yahoo.co.id](mailto:jurnalsosioreligia@yahoo.co.id)

Contoh model catatan kaki:

<sup>1</sup> Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1990), p. 145.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 146.

<sup>3</sup> Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat...*, pp. 147-148.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka

Brinton, Crane, *The Shaping of The Modern Mind*, New York: A Mentor Book, 1989.

Eddwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.

Zahri, Mustafa, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

## **SOSIO-RELIGIA**

*Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*

Merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh *LinkSAS (Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial)*, sebuah forum diskusi yang membahas seputar kajian agama dan sosial (humaniora). Redaksi membuka kesempatan kepada berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana keislaman yang humanis dengan karya-karya aspiratif-komunikatif. Tulisan tidak mencerninkan *mainstream SOSIO-RELIGIA* dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.